

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Judijanto, Loso dan Syaiful Bahri. *Pengantar Hukum Kepailitan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026, hlm. 184.

Margono, Rudi. *Hukum Kepailitan: Strategi Menghadapi PKPU bagi Debitur*. PROFESOR RUDI MARGONO, 2026, hlm. 180.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016.

Zainuddin, Z., Mujhirul, I., Ary, P., Muhammad Fuad, Z. S., Aini, S., Diana, D. dan Nazli, F. *Manajemen Pendidikan Multikultural: Landasan, Konsep, dan Manajemen dalam Menata Keberagaman*. 2025, hlm. 204.

B. Jurnal

Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, dan Silfia Hanani. “Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 12 No. 6, 2025.

Aurelia, Ailsa Hasna, R. Suharto, dan Siti Malikhatun Badriyah. “Implementasi Akta De Command dalam Penyelesaian Pelunasan Kredit Macet.” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 14 No. 3, 2025.

David, G. (2025). Analisis Yuridis Status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam Harta Pailit. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9), 37–54.

Faizah, Fifi Nur, dan Eko Nurhadi. “Coaching for Empowering Digital Marketing for MSMEs in Malang City: A Case Study of the Community-Based Approach.” *Jati Emas (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 9 No. 1, 2025.

Hardyansah, Rommy, dkk. “Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet: Keseimbangan Perlindungan Bank dan Debitur.” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6 No. 3, 2026.

Harmono, Harry, Gunardi Lie, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. “Kepastian Hukum Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Pemberian Upah Proses terhadap Pekerja.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, Vol. 3 No. 2, 2025.

Maftukhin, Maftukhin. “Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Sidang Perceraian oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rembang.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 13 No. 2, 2025.

- Namang, Katharina Woli, dan Desideratio Primus Naitili. "Analisis Puisi Dalam Diriku Karya Sapardi Djoko Damono Melalui Pendekatan Struktural." *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Nesta, M. F. (2024). Upaya Hukum Kreditur Atas AYDA yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit Oleh Kurator. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*, 12(3), 45–62.
- Pandiangan, M. A., J. Widarto, I. M. Kantikha, Z. Judge, dan T. Elawati. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Bank Selaku Kreditur Separatis dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan." *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2, 2025.
- Pratiwi, dan N. Maulisa. "Mekanisme Aset yang Diambil Alih pada Fasilitas Kredit Pemilikan Rumah PT Bank X." *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2024.
- Purnama, R., & Handayani, S. (2025). Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Kecil Menengah Terhadap Mekanisme AYDA dalam Perkara Kepailitan. *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, 8(1), 72–91.
- Putri, Anggia, dkk. "Pembentukan Kata dalam Bahasa: Kajian Konseptual tentang Morfologi." *Journal Education and Government Wiyata*, Vol. 3 No. 1, 2025.
- Rusli, Tami. "Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal Pactum Law*, Vol. 2 No. 1, 2024.
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2025). Kedudukan Bank Sebagai Pemegang AYDA Terhadap Hak Separatis Berdasarkan UU Kepailitan dan SEMA No. 3 Tahun 2023. *ALSA Indonesia Law Journal*, 7(1), 89–106.
- Siahaan, H., Ginting, B., & Saidin, O. K. (2024). Akibat Hukum Daluarsa Atas Pembelian Agunan Debitur Oleh Kreditur (Bank) Secara Lelang Atau Penyerahan Sukarela Menggunakan Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 5(1), 12–29.
- Slamet, Sri Redjeki, dan Fitria Olivia. "Permohonan Kepailitan atas Developer Apartemen Tidak Memenuhi Persyaratan Fakta yang Terbukti Secara Sederhana: Suatu Kajian Keadilan dan Kepastian Hukum." *Lex Jurnalica*, Vol. 21 No. 1, 2024.
- Soediro, R. A. "AYDA yang Dilakukan oleh Kreditur Separatis dalam Melaksanakan Hak Eksekusinya Ketika Debitur Dinyatakan Pailit Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2026.
- Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan Debitur." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 9 No. 1, 2024.
- Wulandari, Magvirah Dwi, Abdul Qahar, dan Hasnan Hasbi. "Tinjauan Hukum dalam Proses Kepailitan terhadap Kedudukan Kreditur dan Debitur Guna

Pemenuhan Hak atas Aset Boedel Pailit.” *Legal Dialogica*, Vol. 1 No. 1, 2025.

C. Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Agustina, Saptarina Dian. *Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Pengambilalihan Agunan (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*. Tesis. Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia, 2023,

Anggara, H. *Kepastian dan Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran BPHTB Atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)*. Disertasi Doktor. Universitas Jambi, 2025, hlm. 101–109.

Awanda Mutiara Fauzah, A. M. F. *Peran Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga Jkt Pst)*. Disertasi Doktor. UPT. Perpustakaan Undaris, 2025, hlm. 218–229.

Camelita, Listyani, Dewi, Amelia Sri Kusuma dan Suwardiyati, Rumi. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Melalui Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Repository Universitas Brawijaya, 2025.

Daun, A. (2025). *Reformulasi Pengaturan Cross-border Insolvency di Indonesia melalui Implementasi Prinsip Modified Universalism dalam Uncitral Model Law 1997 (Studi Perbandingan Pengaturan di Singapura dan Jepang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Falah, Zuhdi. *Keabsahan Penerapan Mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Bentuk Alternatif Upaya dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN.Denpasar)*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 32–94.

Genta, Eranda. *Implementasi Perjanjian Jual Beli (PJB) Dan Akta Jual Beli (AJB) Berdasarkan Hasil Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)*. Disertasi. Universitas Lampung, 2025, hlm. 112.

Herlambang, Rendy. *Upaya Penyelesaian Terhadap Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam Proses Kepailitan Debitur Bank, Debitur an. PT SIP pada Bank X*. Tesis. UGM Electronic Theses and Dissertations, 2021.

Nurwahyudin, Dindin Syarief. *Rekonstruksi Yuridis Perjanjian Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Terhadap Hak Kebendaan Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Disertasi. S3 HKI UIN Siber Syekh Nurjati, 2025, hlm. 304.

Putri, Komang Ayu Ananda dan Rudy, Dewa Gde. "Akibat Hukum Kepailitan Debitur Terhadap Hak Eksekusi Benda Jaminan oleh Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan." *Journal Ilmu Hukum* Vol. 10, No. 11, 2022.

Ramadhan, Muhammad Rizki. *Penerapan Actio Pauliana dalam Menjamin Boedel Pailit atas Tindakan Fraudulent Transfer yang Dilakukan oleh Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus Pailit/2016)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Risdalena, R. *Dampak Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Tentang Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Palangka Raya*. Disertasi Doktor. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2025, hlm. 306–312.

SANTOSO, Chrestella Carissa. *Implementasi teori utilitarian dalam HUKUM perbankan berupa cessie dan ayda serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi*. 2025. PhD Thesis. Universitas atma jaya yogyakarta.

Wicaksono, Yandi. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BTN*. Disertasi. 2025,

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Jakarta, 29 Desember 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440.

